

WORKSHOP BEDAH PANDUAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNESCO BAGI AKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI NTB

Lalu Hamdian Affandi¹⁾, Arif Widodo¹⁾, Asri Fauzi¹⁾, Vivi Rachmatul Hidayati¹⁾

¹⁾Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

Corresponding author : Arif Widodo
E-mail : arifwidodo@unram.ac.id

Diterima 11 Mei 2022, 02 Juni 2022, Disetujui 03 Juni 2022

ABSTRAK

Pendidikan inklusif di provinsi NTB telah lama didengungkan. Namun demikian dalam implementasinya di sekolah pendidikan inklusif masih banyak mengalami hambatan. Implikasinya adalah perkembangan pendidikan inklusif di NTB masih jauh dari harapan. Salah satu hambatan yang dijumpai adalah tidak adanya panduan praktis dalam pengembangan implementasi pendidikan inklusif di sekolah. UNESCO sebagai salah satu lembaga dunia yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan inklusif telah menerbitkan panduan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah. Pada dasarnya panduan tersebut telah disusun secara sistematis, namun demikian panduan tersebut terlalu kompleks sehingga perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi sekolah di NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada aktor pendidikan dalam menyusun panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sasaran kegiatan ini adalah para aktor pendidikan di provinsi NTB yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, NGO dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Melalui *workshop* ini diharapkan dapat tersusun draf panduan pengembangan pendidikan inklusif yang lebih sederhana sehingga mudah diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Alur kegiatan dilakukan dengan tahapan ICARE (Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension). Hasil akhir kegiatan didapatkan tiga draf panduan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah, antara lain draf pengembangan sekolah inklusif unggulan, draf panduan pengembangan pendidikan inklusif dalam pembelajaran dan draf panduan pelibatan mitra dalam pendidikan inklusif.

Kata kunci: panduan pengembangan; pendidikan inklusif; aktor pendidikan.

ABSTRACT

Inclusive education in the province of NTB has long been touted. However, in its implementation in schools, inclusive education still faces many obstacles. The implication is that the development of inclusive education in NTB is still far from expectations. One of the obstacles encountered is the absence of practical guidelines in developing the implementation of inclusive education in schools. UNESCO as one of the world institutions that pay great attention to inclusive education has published guidelines for the development of inclusive education in schools. These guidelines have been compiled systematically, however, these guidelines are too complex and need to be simplified and adapted to the conditions of schools in NTB. Based on these problems, it is necessary to hold community service activities with the theme of workshops on the preparation of guidelines for the development of inclusive education based on guidelines that have been published by UNESCO. The target of this activity is education actors in the province of NTB consisting of elements of the government, universities, non-governmental organizations, and schools providing inclusive education. Through this workshop, it is hoped that a simpler draft guide for the development of inclusive education can be drawn up so that it is easy to implement in the implementation of inclusive education in schools. The flow of activities is carried out in ICARE stages (Introduction, Connection, Application, Reflection, and Extension). The final results of the activity obtained three drafts of guidelines for developing inclusive education in schools, including a draft of developing inclusive schools, a draft of a guide for developing inclusive education in learning, and a draft of a guide for involving partners in inclusive education.

Keywords: development guide; inclusive education; education actor.

PENDAHULUAN

Implementasi pendidikan inklusif merupakan amanat UU No, 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut secara implisit menyiratkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan cara mengakomodasi kehadiran dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler (Ilahi, 2013). Semua anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (Desiningrum, 2016). Kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler tentunya menjadi pekerjaan baru bagi para guru di sekolah reguler (Sulistiyadi, 2014). Idealnya semua guru telah mendapatkan pelatihan dalam pendidikan inklusif berdasarkan model disabilitas hak asasi manusia dan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan (Tichá *et al.*, 2018). Namun demikian, dalam prakteknya pendidikan inklusif masih jauh dari tataran ideal yang diharapkan. Pendidikan inklusif masih banyak mengalami kendala dalam implementasinya (Iryayo, Anggriyani and Herawati, 2018). Indikasi adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam pendidikan inklusif salah satunya adalah masih adanya beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif (Sulthon, 2019).

Adanya kesenjangan dalam praktek pendidikan inklusif di sekolah, menunjukkan bahwa pemahaman aktor pendidikan terhadap hakekat pendidikan inklusif masih kurang. Keterbatasan pemahaman tentang pendidikan inklusif banyak terjadi, salah satunya di wilayah NTB. Pendidikan inklusif pada dasarnya telah lama dikembangkan di provinsi NTB. Bahkan provinsi NTB sendiri telah mendeklarasikan diri sebagai provinsi inklusif. Berbagai daerah di provinsi NTB telah menerapkan pendidikan inklusif pada berbagai jenjang pendidikan. Salah satu daerah yang secara masif dan menjadi pusat pengembangan pendidikan inklusif di NTB adalah kabupaten Lombok Tengah. Gaung pendidikan inklusif di kabupaten Lombok Tengah telah terdengar hingga ke level nasional, namun demikian gemanya pendidikan inklusif yang terus didengungkan di provinsi NTB pada tataran implementasinya cukup mengawatirkan (Setiawan *et al.*, 2020). Di atas kertas provinsi NTB memang telah menjadi provinsi inklusif, namun dalam implementasinya di lapangan bukan berarti telah terbebas dari hambatan. Hasil penelitian (Widodo and Umar, 2020) menemukan data bahwa ada beberapa sekolah yang pada dasarnya belum siap menyelenggarakan

pendidikan inklusif. Salah satu contohnya adalah masih banyak sekolah reguler yang tidak memiliki guru pendamping khusus, tetapi dipaksa menerima anak berkebutuhan khusus (Harsi and Lestari, 2018). Implikasinya adalah layanan belajar yang diberikan kepada siswa tidak dapat maksimal. Guru pendamping khusus merupakan pilar dalam pendidikan inklusif (Zakia, 2015). GPK juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengoptimalkan perkembangan anak secara akademik maupun non akademik (Wardah, 2019). Ketidaksiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif diperburuk dengan tidak adanya panduan praktis bagaimana menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif sering tidak disertai dengan panduan yang jelas bagaimana pengimplementasiannya, sehingga sekolah merasa kesulitan dalam mengembangkan pendidikan inklusif (Hermanto *et al.*, 2016). Hal inilah yang membuat beberapa sekolah merasa enggan untuk menjadi sekolah inklusif.

Berbicara mengenai panduan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah UNESCO sebagai salah satu lembaga internasional yang fokus di bidang pendidikan telah menerbitkan buku yang berisi tentang panduan pengembangan sekolah unggulan inklusif, panduan mengembangkan praktek inklusif, dan panduan bekerja dengan mitra (UNESCO-IBE, 2021). Panduan ini dikeluarkan tidak lain karena pendidikan inklusif adalah prioritas utama UNESCO. Hal ini cukup krusial karena pendidikan inklusif berkaitan dengan masalah keadilan sosial, hak asasi manusia dan martabat manusia (Sriwarthini *et al.*, 2020). Keseriusan UNESCO terhadap pendidikan inklusif dinyatakan dalam Agenda 2030, yaitu inklusi menyiratkan adanya pemerataan dan memastikan bahwa setiap pelajar memiliki kedudukan setara. Kebijakan inklusif menurut UNESCO sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk “memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua” (UNESCO-IBE, 2021).

Panduan pengembangan pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh UNESCO pada dasarnya bertujuan untuk memberikan fasilitas pada aktor kunci pendidikan dalam mengembangkan sekolah inklusif. Meskipun demikian, sejauh ini panduan tersebut belum mendapatkan perhatian dari masyarakat dan aktor pendidikan di NTB. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah untuk

membangun pemahaman dan kepedulian mengenai sekolah inklusif berdasarkan panduan tersebut. Isu pendidikan inklusif membutuhkan berbagai penyesuaian dari sekolah, baik itu di level manajemen, kelas, dan pola-pola kemitraan antara sekolah dan pihak-pihak terkait (Jauhari, 2018). Selain itu, panduan yang diterbitkan terlalu kompleks sehingga perlu bedah dan disederhanakan sesuai dengan kondisi sekolah di NTB. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu diadakan kegiatan *workshop* penyusunan panduan pengembangan pendidikan inklusif berdasarkan panduan yang telah diterbitkan oleh UNESCO. Sasaran kegiatan ini adalah para aktor pendidikan di provinsi NTB yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, NGO dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kegiatan *workshop* ini bertujuan untuk memberi pelatihan kepada para aktor pendidikan dalam menyusun draf panduan pengembangan pendidikan inklusif yang lebih sederhana sehingga mudah diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

METODE

Kegiatan *workshop* bedah panduan pengembangan sekolah inklusi dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara INNOVASI dengan FKIP Universitas Mataram. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari. *Workshop* pertama dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, dan *workshop* kedua dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022. Kegiatan *workshop* ini dilaksanakan di Hotel Fave, jalan langko No 21-23 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan *workshop* ini dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 15.00 WITA. Dikarenakan kegiatan dilakukan pada masa pandemi maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *blended*, melalui aplikasi Zoom Meetings dan kegiatan tatap muka terbatas. Seluruh peserta yang hadir secara tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan. Sasaran kegiatan ini adalah para aktor pendidikan yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan dalam bidang pendidikan inklusif di NTB, unsur perguruan tinggi selaku pengembang pendidikan inklusif, NGO selaku pemerhati pendidikan inklusif dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Kegiatan *workshop* pada hari pertama bertujuan untuk membangun kesepahaman dari aktor Pendidikan tentang panduan pengembangan Pendidikan inklusif di sekolah, sedangkan *workshop* hari kedua difokuskan pada penyusunan panduan operasional tentang pengembangan pendidikan inklusif di

sekolah. Alur kegiatan dilakukan dengan tahapan ICARE (Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension). Pada tahap *introduction* peserta diberikan materi pengantar dari perwakilan UNESCO di Indoseia tentang panduan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah. Setelah mengikuti tahapan ini peserta diharapkan dapat memahami isi dari panduan pengembangan pendidikan inklusif UNESCO. Pada tahap ini pemateri memberikan penjelasan kepada peserta tentang tujuan dari kegiatan *workshop* yang akan dilakukan. Tahap selanjutnya adalah *connection* yang berisi tentang kegiatan *brainstorming* atau diskusi berbagi informasi dari peserta tentang pendidikan inklusif. Pada tahapan ini peserta diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang praktek pendidikan inklusif yang telah diterapkan pada instansinya masing-masing. Tahapan selanjutnya adalah *application*. Tahap ini adalah tahapan inti dimana peserta secara berkelompok berdiskusi untuk menyusun pedoman pengembangan pendidikan inklusif disekolah berdasarkan panduan yang diterbitkan UNESCO. Setelah selesai tahapan *application* kemudian masuk ke tahap *reflection* dimana peserta melihat kembali hasil panduan yang telah disusun untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Tahapan terakhir dari kegiatan *workshop* adalah *extension*. Tahapan ini berisi tentang tindak lanjut kegiatan *workshop* yaitu sosialisasi draf panduan pengembangan pendidikan inklusif pada instansi masing-masing peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kegiatan

Pada acara pembukaan *workshop* diawali dengan berdoa bersama, dan dilanjutkan dengan sambutan dari INNOVASI yang dilakukan via Zoom oleh ibu Sri Rejeki Widuri selaku provincial manager INNOVASI NTB. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar dari Dekan FKIP Universitas Mataram yaitu Bapak Prof. Dr. H.A. Wahab Jufri, M. Sc. Setelah dilakukan pembukaan pada acara *workshop* dilanjutkan dengan pemaparan tentang konsep Pendidikan inklusif yang seharusnya disampaikan dari perwakilan UNESCO, namun karena tidak dapat menghadiri maka digantikan oleh ketua Laboratorium Pendidikan Inklusi yaitu Bapak Lalu Hamdian Affandi.

Setelah dilaksanakan beberapa rangkaian acara kemudian dilanjutkan pada acara inti (tahapan *application*) yaitu focus group discussion (FGD). Pada kegiatan FGD ini, peserta dibagi menjadi 3 kelompok yang

membahas topik yang berbeda-beda. Adapun topik yang dibahas pada *workshop* antara lain:

a. Pengembangan Pendidikan Inklusif di sekolah

Pada topik ini peserta *workshop* diharapkan mampu menyusun panduan pengembangan pendidikan inklusif sekolah unggulan. Kelompok yang membahas topik ini diberikan panduan pertanyaan oleh fasilitator yaitu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sekolah untuk mengembangkan program pendidikan inklusif.

b. Pengembangan pendidikan inklusif dalam pembelajaran

Pada topik kedua ini peserta *workshop* diharapkan mampu menyusun panduan pengembangan Pendidikan inklusif dalam pembelajaran. Pada topik ini peserta *workshop* diberikan panduan pertanyaan pada lembar kerja mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan guru untuk mengembangkan program pembelajaran di kelas inklusif.

c. Pelibatan mitra dalam pendidikan inklusif

Pada topik ini peserta *workshop* diharapkan mampu menyusun panduan pengembangan kerjasama dengan mitra dalam pendidikan inklusif. Pertanyaan panduan diskusi kelompok yang berada pada kelompok ini adalah langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sekolah dalam membangun kerjasama dengan mitra untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Kegiatan *workshop* lebih banyak melibatkan peserta untuk berdiskusi melalui FGD karena peserta *workshop* merupakan aktor kunci dalam bidang pendidikan di NTB sehingga dipandang memiliki kompetensi yang cukup dalam bidang pendidikan inklusif. Para aktor kunci ini diajak untuk secara bersama-sama memikirkan bagaimana menyusun panduan dalam rangka mengembangkan pendidikan inklusif di sekolah. Dalam kegiatan FGD ini, peserta *workshop* berdiskusi bersama kelompok masing-masing membahas topik yang sudah dibagikan. Pada sesi diskusi ini peserta *workshop* diberikan waktu berdiskusi selama 60 menit. Setelah selesai berdiskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan topik pada masing-masing kelompok, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan masukan masukan dari kelompok lain (tahap *reflection*). Kemudian di akhir acara sebelum penutupan, terlebih dahulu diberikan pertanyaan rencana tindak lanjut (RTL) dengan tujuan peserta *workshop* dapat mensosialisasikan apa yang sudah didiskusikan di instansi masing-masing peserta

workshop (tahap *extension*). Melalui sosialisasi pada instansi masing-masing diharapkan panduan yang telah disusun bersama dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan pendidikan inklusif baik dari level pemegang kebijakan sampai pada level pelaksana kebijakan.

Adapun hasil dokumentasi kegiatan *workshop* bedah panduan pengembangan sekolah inklusi UNESCO sebagai berikut:



Gambar 1. Pembukaan kegiatan *workshop* (Sumber : dokumentasi kegiatan).



Gambar 2. Diskusi kelompok peserta *workshop* (Sumber : dokumentasi kegiatan).

Hasil Kegiatan

Kegiatan pada *workshop* hari ke-2 fokus pada penyusunan panduan operasional tentang pengembangan pendidikan inklusif di sekolah. Hasil kegiatan *workshop* hari ke-2 adalah tersusunnya draf panduan operasional tentang pengembangan pendidikan inklusif di sekolah sesuai dengan panduan UNESCO. Terdapat tiga draf yang disusun pada *workshop* hari- 2, antara lain topik pertama: pengembangan pendidikan inklusif di sekolah, topik kedua: pengembangan pendidikan inklusif dalam pembelajaran, dan topik ketiga: pelibatan mitra dalam pendidikan inklusif. Berikut ini dapat disajikan secara singkat inti pokok dari draf panduan pengembangan pendidikan inklusif pada masing-masing topik.

a. Draf Panduan Pengembangan Pendidikan Inklusif di Sekolah

- 1) Sosialisasikan kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik Baru sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
- 2) Melakukan Assesment diagnostic untuk menggali hambatan dan kemampuan spesifik ABK
- 3) Mengklasifikasikan jenis ABK
- 4) Membangun komunikasi dan kesepahaman kepada Orang Tua/Wali ABK
- 5) Sekolah memfasilitasi guru untuk mengembangkan kompetensi dari pusat sumber dan Sumber belajar tentang Pendidikan Inklusif
- 6) Sekolah menunjuk Guru Pembimbing Khusus untuk mendapatkan pengetahuan dan sebagai penghubung guru dengan pusat sumber belajar
- 7) Sekolah mengadaptasi dan memodifikasi kurikulum sebagai kebutuhan.
- 8) Merancang Program Pembelajaran Individual (sesuai kebutuhan)

b. Draf Panduan Pengembangan Pendidikan Inklusif dalam Pembelajaran

- 1) Melakukan identifikasi awal (menentukan tipikal ABK anak)
- 2) Melakukan asesmen diagnostik (menelusuri kemampuan dan ketidakmampuan anak pada suatu materi)
- 3) Menyusun program pembelajaran klasikal atau individual
- 4) Melaksanakan pembelajaran klasikal atau individual
- 5) Melakukan penilaian dan evaluasi

c. Draf Panduan Pelibatan mitra dalam Pendidikan Inklusif

- 1) Pemerintah Desa harus mendata anak berkebutuhan khusus dan memberikan pemahaman tentang pentingnya Pendidikan untuk ABK terhadap wali
- 2) Diharapkan pemerintah harus membentuk unit layanan disabilitas dibidang pendidikan dan kebudayaan
- 3) Kerjasama dengan tenaga ahli terkait penanganan ABK dengan karakteristik tertentu (ABK dengan hambatan pengelihatan, hambatan pendengaran, hambatan emosional dan hambatan intelektual)
- 4) Melibatkan Lembaga Bantuan Hukum LBH

- 5) Membentuk forum dan mengadakan Pareanting secara terperiode berkelanjutan
- 6) Sekolah dapat melakukan Kerjasama dengan perusahaan local maupun asing yang mengelola program CSR
- 7) Perguruan tinggi dapat mempersiapkan calon guru untuk melakukan pendampingan pada guru-guru di sekolah inklusif terkait pembelajaran yang diberikan
- 8) Melibatkan organisasi disabilitas tingkat desa dalam pendataan serta melibatkan kader-kader posyandu
- 9) Membentuk unit layanan disabilitas tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi
- 10) Menjalin kerjasama dengan tenaga ahli difasiltasi oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan.
- 11) Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (MOU) LBH
- 12) Kepala Sekolah dan Komite membentuk Forum Komunikasi Keluarga berupa Surat Keputusan Bersama
- 13) Mengajukan proposal Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mengelola program CSR
- 14) Perguruan Tinggi membuat program pendampingan calon guru sebagai bagian dari program Praktek Pembelajaran Lapangan.

Tiga draf yang disusun oleh peserta *workshop* yang telah diuraikan merupakan draf awal, sehingga perlu mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan. Draf panduan yang dihasilkan diharapkan dapat membantu sekolah yang selama ini mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan pendidikan inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan *workshop* yang dilakukan telah berhasil membangun kesepahaman aktor pendidikan di NTB terhadap pendidikan inklusif dan berhasil menyusun tiga draf panduan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah, antara lain draf pengembangan sekolah inklusif unggulan, draf panduan pengembangan pendidikan inklusif dalam pembelajaran dan draf panduan pelibatan mitra dalam pendidikan inklusif. Draf panduan yang telah disusun diharapkan ada tindak lanjut, tidak selesai setelah didiskusikan. Selain itu draf panduan yang disusun dapat diimplementasikan untuk pengembangan pendidikan inklusif di sekolah, oleh karena itu disarankan agar semua aktor pendidikan

selalu menjaga komitmennya untuk terus menyuarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan *workshop* ini terselenggara atas kerjasama INNOVASI dengan FKIP Universitas Mataram, maka dari itu terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada INNOVASI dan FKIP Universitas Mataram serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sehingga *workshop* dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Desiningrum, D. R. (2016) Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Psikosain.
- Harsi, P. and Lestari, K. (2018) 'Kesiapan guru sekolah reguler untuk implentasi pendidikan inklusif Readiness of regular school teachers for inclusive education implementation', 14(1), pp. 57–61.
- Hermanto, H. et al. (2016) 'Analisis potensi dan masalah pada fase konseptualisasi pengembangan model supervisi pembelajaran di sekolah dasar inklusi', JKP (Jurnal Pendidikan Khusus), 12(1), pp. 14–30. doi: 10.21831/jpk.v12i1.12836.
- Ilahi, M. T. (2013) Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Iryayo, M., Anggriyani, D. and Herawati, L. (2018) 'Educational Partners' Perception Towards Inclusive Education', INKLUSI, 5(1), p. 25. doi: 10.14421/ijds.050102.
- Jauhari, A. R. dan M. N. (2018) 'Keterlibatan Orangtua dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus', Belantika Pendidikan, 2(1), pp. 28–36.
- Setiawan, H. et al. (2020) 'Analisis kendala guru di SDN Gunung Gatep Kabupaten Lombok Tengah dalam implementasi pendidikan inklusif', Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 20(2), pp. 169–183.
- Sriwarthini, N. P. N. et al. (2020) 'Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif Di SDN 20 Mataram', Progres, 1(2), pp. 106–114. Available at: <http://prospek.unram.ac.id/index.php/PROSPEK/article/view/14/15>.
- Sulistiyadi, H. K. (2014) 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo', Kebijakan dan manajemen publik, 2(1), pp. 1–10.
- Sulthon, S. (2019) 'Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan', INKLUSI, 6(1), p. 151. doi: 10.14421/ijds.060107.
- Tichá, R. et al. (2018) Inclusive Education Strategies: A Textbook. Minneapolis: University of Minnesota. Available at: https://www.unicef.org/armenia/media/3501/file/Inclusive_education_strategies_Textbook_2018.pdf.
- UNESCO-IBE (2021) Reaching Out To All Learners: a resource pack for supporting inclusion and equity in education. Geneva: The UNESCO International Bureau of Education.
- Wardah, E. Y. (2019) 'Peranan guru pembimbing khusus lulusan non-pendidikan luar biasa (PLB) terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi kabupaten Lumajang', JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi), 2(2), pp. 93–108. doi: 10.26740/inklusi.v2n2.p93-108.
- Widodo, A. and Umar, U. (2020) 'Inclusive Primary Schools Without Shadow Teachers: Can Learning Services be Optimal?', Jurnal Educative: Journal of Educational Studies, 5(2), p. 149. doi: 10.30983/educative.v5i2.3196.
- Zakia, D. L. (2015) 'Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi', in Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, p. 115.